Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan 2024

Selasa, 30 Juli 2024

Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, menerima penghargaan "Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan" dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Andriyanto dalam membina dan mengukuhkan desa-desa/kelurahan-kelurahan binaan di wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DKSH). Penghargaan tersebut diberikan pada acara Peresmian dan Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024 di Singhasari Resort, Kota Batu.

Selain Andriyanto, dua desa dan satu kelurahan juga menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan, yaitu Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari; Desa Benerwojo, Kecamatan Kejayan; dan Desa Jatisari, Kecamatan Purwodadi. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan, Alfan Nurul Huda, juga mendapat penghargaan atas 'Peran Aktif dalam Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum'.

Andriyanto mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan ini, mengingat jumlah desa/kelurahan sadar hukum di Kabupaten Pasuruan terus bertambah. Saat ini, terdapat 44 desa dan 1 kelurahan yang telah dikategorikan sadar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat di wilayah tersebut telah dilakukan secara optimal. Andriyanto berharap, jumlah desa/kelurahan sadar hukum di Kabupaten Pasuruan akan terus meningkat.

Andriyanto juga menekankan bahwa Desa/Kelurahan Sadar Hukum memiliki dampak positif yang signifikan, seperti penurunan angka kriminalitas, penyelesaian hukum yang lebih cepat, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum. Ia mengajak masyarakat untuk terus belajar dan berdiskusi tentang hukum guna mencapai win-win solution dalam menyelesaikan masalah hukum.

Alfan Nurul Huda menjelaskan bahwa untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, harus ada Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang dibentuk secara mandiri oleh warga untuk meningkatkan kesadaran hukum. Kadarkum kemudian dibina oleh Pembina Kadarkum Tingkat Pusat dan Pembina Kadarkum Tingkat Daerah. Setelah proses pembinaan, Kelompok Kadarkum ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan. Tahun 2025, pihaknya menargetkan tambahan 10 desa/kelurahan sadar hukum yang akan dibina.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.